



LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA (LMCK) TRIWULAN IV TAHUN 2024 PUSAT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja Eselon II merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP. 1360 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024.

Dengan telah disusunnya Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat yang nyata sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Sektor Perhubungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Tahun 2024 adalah dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan kinerja yang memberikan gambaran secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sedangkan tujuan dari kegiatan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulanan dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan;
2. Untuk membandingkan realisasi kinerja triwulanan dengan target tahunan;
3. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan dalam mencapai tujuan organisasi.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi salah satu unit kerja Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sistem dan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema pembiayaan, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

- b. penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema pembiayaan, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema pembiayaan, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- d. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan;
- c. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang;
- d. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian.

1.4 Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pencapaian tujuan. Sumber daya manusia akan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Triwulan IV Tahun 2024, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Kementerian Perhubungan sebanyak 34 orang. Dalam mendukung tercapainya kinerja PPIT juga dibantu oleh pegawai non-PNS sebanyak 3 orang, sehingga total SDM pada Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Kementerian Perhubungan sebanyak 37 orang.

Komposisi Sumber Daya Manusia di Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Kementerian Perhubungan

Jabatan	Gender		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Pejabat Struktural	3	2	5
Pejabat Fungsional	3	5	8
Fungsional Umum	13	8	21
Pegawai non-PNS	3	--	3
Total	22	15	37

Untuk kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan, jumlah pegawai ASN di Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT), terinci sebagai berikut:

- ASN jenjang pendidikan S3/Doktor : 2 (dua) orang
- ASN jenjang pendidikan S2/Master : 12 (duabelas) orang
- ASN jenjang pendidikan S1/Sarjana : 9 (sembilan) orang
- ASN jenjang pendidikan Diploma IV : 3 (tiga) orang
- ASN jenjang pendidikan D.III : 6 (enam) orang
- ASN jenjang pendidikan SLTA : 2 (dua) orang

1.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi telah mengajukan Perjanjian Kinerja yang telah di reviu dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi sebagai pihak pertama yang berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan Sekretaris Jenderal sebagai pihak kedua yang akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.

Perjanjian Kinerja Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/ Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi	Nilai	75
		1. Fasilitas Kemitraan dan Investasi Sektor Transportasi Darat dan Perkotaan	Nilai	75
		2. Fasilitas Kemitraan dan Investasi Sektor Transportasi Laut dan Penunjang	Nilai	50
		3. Fasilitas Kemitraan dan Investasi Sektor Transportasi Udara dan Perkeretaapian	Nilai	100

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki total anggaran **Rp23.385.756.000** dimana terinci sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pengelolaan Organisasi dan SDM | : Rp 1.188.364.000 |
| 2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum | : Rp 5.437.865.000 |
| 3. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama | : Rp16.759.527.000 |

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

2.1 Capaian Kinerja Triwulan IV Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja TW I			Realisasi Kinerja TW II			Realisasi Kinerja TW III					Kinerja (%)	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop		Des
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/ Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Tingkat Pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi	Nilai	75	3	6	10	15	20	25	35	40	50	60	70	75	100 %

Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) memiliki Sasaran Program **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dan Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan** yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: **Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi**.

Selama periode Triwulan IV (Bulan Oktober – Desember) Tahun 2024, kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi yang dilaksanakan oleh Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) mencapai nilai 75 atau sebesar 100 % sesuai dengan target awal capaian.

2.2 Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
1	Pengembangan dan Peningkatan SDM Aparatur	769.982.000	769.980.896	100,00%	1.104
2	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kearsipan	418.382.000	417.931.117	99,89%	450.883
3	Belanja Gaji Pegawai	2.147.531.000	2.147.526.953	100,00%	4.047
4	Kebutuhan Sehari-hari perkantoran	400.999.000	398.140.462	99,29%	2.858.538
5	Langganan Daya dan Jasa	1.016.472.000	1.016.281.400	99,98%	190.600
6	Pemeliharaan Kantor	151.730.000	151.730.000	100,00%	-
7	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	489.265.000	484.160.675	98,96%	5.104.325
8	Pengadaan Laptop	135.000.000	135.000.000	100,00%	-
9	Pengadaan PC	60.000.000	60.000.000	100,00%	-
10	Pengadaan Printer dan Scanner	4.253.000	4.252.300	99,98%	700
11	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	165.747.000	165.747.000	100,00%	-
12	Perencanaan dan Keuangan serta evaluasi Pelaporan Pusat Tahun 2024	344.943.000	344.941.596	100,00%	1.404
13	Pelaporan Monitoring dan Evaluasi serta Pengadministrasian BMN Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Tahun 2024	253.358.000	249.998.199	98,67%	3.359.801
14	Penyusunan Laporan Keuangan dan Anggaran Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	333.839.000	333.837.995	100,00%	1.005
15	Penyusunan Studi Identifikasi Proyek Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara	1.220.301.000	1.220.605.592	100,02%	(304.592)
16	Penyusunan Studi Identifikasi Proyek Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang	1.432.162.000	1.432.161.302	100,00%	698
17	Penyusunan Studi Identifikasi Proyek Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Perkotaan	1.423.967.000	1.423.966.188	100,00%	812
18	Penyusunan Studi Identifikasi Proyek Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Perkeretaapian	1.216.086.000	1.216.084.931	100,00%	1.069
19	Penyusunan Kebijakan Teknis Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Tahun 2024	258.798.000	258.796.930	100,00%	1.070
20	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Proyek Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang	1.230.498.000	1.230.496.997	100,00%	1.003

21	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Proyek Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan	811.677.000	795.554.022	98,01%	16.122.978
22	Pengembangan Sistem layanan KPBU Kementerian Perhubungan	66.650.000	66.650.000	100,00%	-
23	Bimtek Pelaksanaan Proyek Kerjasama Infrastruktur Transportasi Udara dan perkeretaapian di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2024	14.700.000	14.700.000	100,00%	-
24	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan evaluasi Proyek Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian	572.928.000	572.927.934	100,00%	66
25	Bimbingan Teknik Proyek Infrastruktur Sektor Transportasi Darat dan Perkotaan	381.286.000	381.284.526	100,00%	1.474
26	Bimtek Proyek Infrastruktur Sektor Transportasi Laut dan Penunjang	829.294.000	821.947.415	99,11%	7.346.585
27	Forum Bisnis dan Kemitraan Bidang Investasi	1.950.341.000	1.942.136.256	99,58%	8.204.744
28	Fasilitas Proyek Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	1.000	-	0,00%	1.000
29	Koordinasi dan sinkronisasi proyek pembiayaan infrastruktur transportasi	1.775.188.000	1.775.186.946	100,00%	1.054
Jumlah		19.875.378.000	19.832.027.632	99,78%	43.350.368

Realisasi daya serap keuangan Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi posisi per akhir Desember 2024 adalah sebesar Rp. 19.832.027.632 atau mencapai 99,78%. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 43.350.368 dari total pagu anggaran Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp.19.875.378.000.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi semula memiliki anggaran sebesar Rp 23.385.756.000 kemudian mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 19.875.378.000 dikarenakan adanya Automatic Adjustment dan adanya pengalihan anggaran untuk ke Unit Kerja lain pada program Special Delivery Unit (SDU). Total Daya serap Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi sampai dengan Triwulan IV yaitu sebesar Rp. 19.832.027.632 atau mencapai 99,78%. Dalam realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan di Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 masuk kategori lancar dan tercapai dalam daya serapnya sehingga mencapai target rata-rata daya serap di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

3.2 Saran/Rekomendasi

Guna meminimalisir risiko yang dapat mengganggu kinerja organisasi, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) akan perlu menerapkan:

- a. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana beban kerja yang cukup banyak dan jumlah SDM yang belum memadai perlu mendapat perhatian agar unit kerja Eselon I dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsi PPIT sebagai simpul kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- b. Fasilitas, sarana dan peralatan kantor masih kurang memadai;
- c. Perlunya penguatan terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran serta Pengadministrasian Barang Milik Negara (BMN).

Jakarta, Desember 2024

Kepala Pusat Pembiayaan
Infrastruktur Transportasi

M. Arief Affandi
NIP. 19840805 200812 1 001